

PEDOMAN UMUM

PENUMBUHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (KP3HP)



DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
2012



PEDOMAN UMUM

PENUMBUHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (KP3HP)



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

JAKARTA - 2012



KATA PENGANTAR



Penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) disuatu daerah/wilayah, memungkinkan terjadinya harmonisasi beragam upaya yang biasanya terjadi sangat sektoral dan terpisah untuk berfokus pada upaya terpadu dan sinergis yang positif, serta proses yang berkelanjutan. Penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) tersebut bisa menjadi alat yang efektif bagi kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan lain yang terkait, khususnya kebijakan penerapan manajemen dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang terpadu. Namun tantangan untuk mengoperasionalkannya bagi setiap kasus-kasus spesifik di daerah tidaklah mudah mengingat masih belum seragamnya pemahaman tentang program dan kegiatan penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh beberapa instansi dalam menelaah konsep ini, akan tetapi dalam tataran implementasi masih dirasakan perlunya peningkatan yang sinergi lintas pihak dalam menerapkan program tersebut. Prakarsa dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian untuk menerbitkan buku pedoman umum "**PENUMBUHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (KP3HP)**" ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Disamping itu, panduan ini diharapkan dapat merumuskan langkah positif ke depan, baik menyangkut kebijakan dan program atau tindak lanjut yang perlu ditempuh oleh pemerintah maupun semua pihak terkait sesuai dengan peran masing-masing.

Demikian, semoga pedoman ini bermanfaat.



Jakarta, Desember 2012

Pih. Direktur Jenderal PPHP

H. Yasid Taufik, MM....)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Sasaran	4
1.5. Ruang Lingkup	6
BAB II KONSEP, PERMASALAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	7
2.1. Konsep Penumbuhan KP3HP	7
2.2. Permasalahan Penumbuhan KP3HP	13
2.3. Strategi Penumbuhan KP3HP	14
2.4. Kebijakan Penumbuhan KP3HP	16
2.5. Indikator Keberhasilan Penumbuhan KP3HP	17
BAB III ORGANISASI PELAKSANA	19
3.1. Tingkat Pusat	19
3.2. Tingkat Daerah	20
BAB IV LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PENUMBUHAN KP3HP..	23
4.1. Sosialisasi Penumbuhan KP3HP	23
4.2. Penentuan Lokasi dan Komoditas	23
4.3. Bantuan Peralatan Mesin	26
4.4. Pendampingan	26
4.5. Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan	26
4.6. Pendanaan	27
4.7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	27



BAB V	POLA PEMBINAAN DAN TAHAPAN PENUMBUHAN KP3HP ..	29
5.1.	Program Aksi dan Tahapan Penumbuhan KP3HP	29
5.1.1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	29
5.1.2.	Pengembangan Permodalan	29
5.1.3.	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi	30
5.1.4.	Pengembangan Usaha	31
5.1.5.	Pengembangan Sarana-Prasarana dan Iklim Usaha	31
5.2.	Pola Interaksi Pembinaan Penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP	33
BAB VI	PENUTUP	35
	DAFTAR PUSTAKA	36





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Generik KP3HP dalam Klaster Industri Pertanian	8
Gambar 2	Model Ekonomik Penumbuhan KP3HP	10
Gambar 3	Hard Infrastructure dan Soft Infrastructure Penumbuhan KP3HP	12
Gambar 4	Skus Penumbuhan KP3HP	13
Gambar 5	Model Interaksi dalam Penumbuhan KP3HP	15
Gambar 6	Pola Interaksi Pembinaan Pembinaan KP3HP pada Ditjen PPHP	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks <i>Check List</i> Dan Kuesioner Kegiatan Identifikasi Kawasan Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Ditjen PPHP Tahun 2013
Lampiran 2	Kuesioner Identifikasi Kelompok Usaha Penghela Pengolahan Hasil Pertanian
Lampiran 3	Kuesioner Kelayakan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian penduduk Indonesia berdomisili di pedesaan, dan sebagian besar adalah petani. Untuk itu, maka pembangunan ekonomi petani pedesaan sebagai satu kesatuan antara pembangunan *sektor pertanian* dan *industri kecil rumah tangga* diarahkan pada upaya pemberdayaan industri pertanian. Mengapa pemberdayaan industri pertanian diperlukan?. Berbagai hal yang mendukung justifikasi program kegiatan tersebut antara lain: (1) Mayoritas masyarakat miskin tinggal di pedesaan yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, (2) Adanya ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa dimana sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di kota-kota besar, dan (3) Sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut menyebabkan intensitas urbanisasi cukup tinggi, serta (4) Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, pengangguran yang tinggi, devisa yang besar dan ketahanan pangan nasional yang lemah. Pada sisi lain, kegiatan di sektor pertanian saat ini yang merupakan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat pedesaan belum dapat memberikan kehidupan yang layak karena nilai tambah dari kegiatan *on farm* pada umumnya belum dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum mampunya produk-produk pertanian kita merespon perubahan tuntutan konsumen saat ini yang menuntut kualitas tinggi, kontinuitas pasokan, ketetapan waktu penyampaian, serta harga yang kompetitif.

Berdasarkan data BPS 2005, jumlah usaha industri kecil rumah tangga sebanyak 44,6 juta unit atau 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.2 juta atau 88,7% dari total tenaga kerja dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 14,8% dari total PDB Nasional. Dari jumlah industri kecil rumah tangga tersebut, hampir sepertiganya adalah sektor industri pertanian (makanan dan minuman/ pangan) dan sebagian besar merupakan usaha non formal (93,54%) dan usaha formalnya hanya (6,46%). Sebagian besar ada di pulau Jawa (74,5%) dan Sumatera (9%) (Kemnekop dan IKM, 2008). Dari usaha kecil (rumah tangga) tersebut, 90,6% merupakan usaha perorangan yang tidak berakta notaris, hanya 4,7% yang berakta notaris dan 1,7 % sudah berbadan hukum (PT, CV, Firma atau Koperasi).

Menyadari realitas di atas, pemberdayaan industri pertanian di pedesaan melalui penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP)

sangat dibutuhkan. Penumbuhan kawasan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) ini akan dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan sejalan dengan berkembangnya kegiatan sektor pertanian di hulu (*on farm*) dan di hilir (*off farm*). Berkembangnya kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian di pedesaan, perluasan diversifikasi produksi pedesaan, pendapatan petani dan mempercepat akumulasi kapital pedesaan.

Proses penumbuhan ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat tani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurut Saragih, perekonomian Indonesia tidak bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi industrialisasi dengan landasan sektor pertanian. Industri pertanian dalam bentuk kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) merupakan jawaban paling tepat, karena mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang panjang. Keterkaitan ke belakang ke sektor pertanian akan memacu pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah/daerah, sehingga lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di suatu wilayah/daerah. Secara tidak langsung hal itu akan menggairahkan lagi kegiatan masyarakat tani, sehingga mengurangi arus urbanisasi.

Penumbuhan KP3HP merupakan alternatif pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian di suatu wilayah/daerah. Bagi pelaku ekonomi, khususnya pelaku usaha industri kecil dan rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan petani, kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) serta koperasi tani (koptan), pendekatan KP3HP ini dapat membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pengembangan jaringan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak yang berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari kebijakan dan program, serta cakupan dampaknya yang signifikan.

Pendekatan KP3HP dapat berkembang pesat tidak sekedar sebagai konsep tetapi juga sebagai platform Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), baik dalam konteks pembangunan ekonomi (nasional, daerah dan lokal), khususnya dalam peningkatan nilai tambah dan peningkatan daya saing. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian di suatu wilayah/daerah saat ini membutuhkan usaha yang sangat memakan waktu sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam rangka memperbaiki kelemahan tersebut, mengoptimalkan pendayagunaan potensi setempat, dan mewujudkan KP3HP berkeunggulan kompetitif di daerah, basis produksi

dan distribusi perlu ditata kembali dan dikembangkan secara sinergis dengan semakin bertumpu pada potensi terbaik dan karakteristik lokal/setempat masing-masing daerah.

Konsep penumbuhan KP3HP, merupakan suatu alternatif yang dipandang sesuai dengan konteks dinamika perubahan yang berkembang dan keragamannya karakteristik daerah di Indonesia. Untuk menerapkan konsep penumbuhan KP3HP, diperlukan panduan yang dapat menjadi pedoman/ acuan bagi petugas Pusat maupun Dinas lingkup pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Ditjen PPHP sebagai lembaga Kementerian Pertanian yang memiliki peran sebagai fungsi intermediasi, berupaya menerbitkan buku Pedoman Umum Penumbuhan Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP).

Dokumen ini dirancang sebagai bahan panduan praktis, dan bukan sebagai dokumen teks rujukan (referensi ilmiah). Karena itu, beberapa hal yang dinilai terlampaui teknis ataupun teoritis sedapat mungkin tidak disampaikan di sini.

1.2. Pengertian

- Kawasan Pertanian : adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional dalam faktor Sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur, dan memenuhi minimum luasan efektif secara ekonomi serta manajemen wilayah, dimana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan (Permentan no. 50/tahun 2012)
- Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) : adalah kawasan yang didesain agar terjadi sinergi antara petani, kelompok tani/ gapoktan, dengan kelompok usaha bersama di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil pertanian yang saling terkait dan terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah dan efisiensi ekonomi secara bersama sehingga secara strategis dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah/ daerah. KP3HP merupakan kawasan pertanian industri yang dapat membangun kawasan mental berindustri di pedesaan sehinggapetani tidak saja sebagai prodisen tetapi juga sebagai pemasok bahan baku industri pengolahan hasil pertanian melalui proses pembersihan (*cleaning*), pemisahan/ sortasi (*grading*), pengolahan (*processing*), pengawetan, penyimpanan/ pergudangan (*warehousing*), pengepakan (*packaging*) dan transportasi serta pemasaran (*marketing*).
- Klaster pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah pengorganisasian dan pengelompokan geografis dari sejumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang saling terkait kegiatannya dan berhubungan dalam satu komunitas serta

saling melengkapi dan saling bersinergi dalam jaringan mata rantai proses penciptaan/ peningkatan nilai tambah dan daya saing, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis.

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) merupakan pengembangan dari konsep-konsep sebelumnya. Sebelum KP3HP telah ada Unit Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP), Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Pengembangan Agribisnis (KAPEMBA), Kawasan Usaha Bersama Agribisnis (KUBA), Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU), Program insentif 2 in 1, dan lain-lain.

Menurut UU No. 9 tahun 1995, tentang Industri Kecil menyebutkan bahwa industri kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan (omset) tahunan minimal sebesar Rp.1 milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, paling banyak Rp. 200 juta. Sedangkan menurut BPS, berdasarkan tenaga kerja membagi industri menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Industri rumah tangga : jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang
2. Industri kecil : jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang
3. Industri menengah : jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang
4. Industri besar : jumlah tenaga kerja 100 orang lebih

1.3. Tujuan

Tujuan utama penyusunan pedoman umum penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) ini antara lain adalah :

1. Memberikan pedoman umum/ panduan pelaksanaan, peran dan tugas masing-masing pelaksana, identifikasi kawasan, mekanisme pendampingan dan pembinaan serta mekanisme dan pengadministrasian dalam penyaluran bantuan sosial (barang).
2. Membangun pilot proyek kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) di suatu wilayah/daerah.
3. Meningkatkan efisiensi, mutu produk, produktifitas, dan pemasaran secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah/ daerah.

1.4. Sasaran

Sasaran penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) pada tahun 2013 dilaksanakan di 7 Propinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Bali, dimana tiap-tiap propinsi dipilih dua kabupaten sebagai pilot proyek, sehingga terdapat 14 pilot proyek.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penumbuhan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) sesuai dengan renstra Ditjen PPHP, Kementan tahun 2010 – 2014, fokus komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu meliputi :

- Komoditas utama : padi, jagung, kedele, gula dan daging sapi
- Komoditas andalan ekspor : Kakao, kopi, sawit, rempah, dan teh
- Komoditas potensial ekspor : Buah tropika, biofarmaka, tanaman hias tropika, bokar, beras specialty, mete, kelapa, atsiri
- Komoditas substitusi impor : Susu, tepung (cassava dan sagu), jeruk, daging ayam dan telur.

1.6. Kegiatan Utama KP3HP

Agar tercapai efiseinsi ekonomi dan bisnis maka kegiatan utama dalam KP3HP yang dirancang adalah :

1. Kegiatan Pengolahan bersama; dalam rangka mencapai efisiensi ekonomis dan penggunaan sumberdaya maka pelaku usaha secara bersama-sama melakukan kegiatan produksi bersama; seperti pengolahan susu dan produk susu sehingga tercapai skala ekonomis.
2. Kegiatan pembelian bahan baku bersama; kegiatan pembelian bersama akan menimalkan biaya bahan baku, karena pembelian sendiri dengan pembelian dalam partai besar akan berbeda dan lebih ekonomis;
3. Kegiatan pemasaran bersama; kegiatan menjual secara bersama akan menaikkan daya tawar produk dan *bargain* pelaku usaha kepada industri pengolah.

Agar kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik maka perlu dirumuskan konsep dan strategi penumbuhan KP3HP.



BAB II

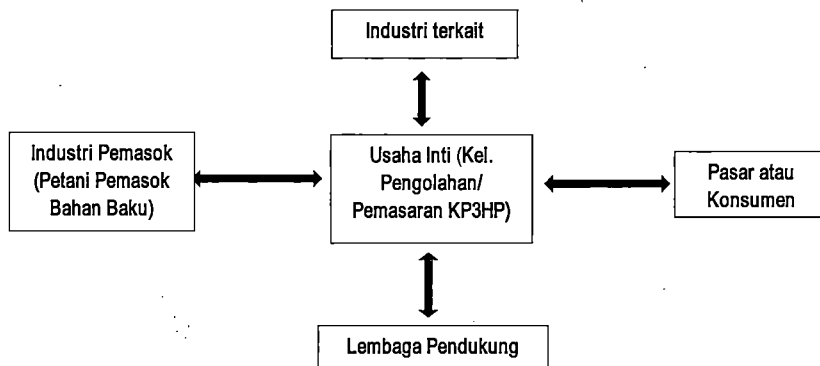
KONSEP, PERMASALAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENUMBUHAN KP3HP

2.1. Konsep KP3HP

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) adalah kawasan yang didesain agar terjadi sinergi antara petani, kelompok tani/ gapoktan dengan kelompok usaha industri pengolahan dan atau pemasaran hasil pertanian yang saling terkait dan terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah, daya saing dan efisiensi ekonomi secara bersama sehingga secara strategis dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah/ daerah. KP3HP merupakan kawasan pertanian industri yang dapat membangun kawasan mental berindustri di pedesaan sehingga petani dan/atau pelaku usaha tidak saja sebagai produsen tetapi juga sebagai pemasok bahan baku industri pengolahan hasil pertanian.

Penumbuhan Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) adalah pengorganisasian dan pengelompokan geografis dari sejumlah unit usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang saling terkait kegiatannya dan terhubung dalam satu komunitas serta saling melengkapi dan saling bersinergi dalam jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah dan daya saing, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis.

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) terdiri dari 1) kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai usaha inti (*core industries*) yang menjadi "fokus perhatian", 2) petani/ kelompok tani/gapoktan sebagai pemasok bahan baku utama (*primary supplier*), 3) industri terkait (*supporting industries*), dan 4) industri terkait (*related industries*), 5) pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), 6) institusi yang berperan menjembatani (*bridging institutions*) misalnya pedagang pengumpul (*broker*), serta 7) pembeli/konsumen (*buyer/consumer*), yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai tambah (*value adding production chain*). Istilah inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku tertentu dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu. Model generik KP3HP dalam klaster industri pertanian dalam bentuk KP3HP dapat dilihat pada gambar 1. dibawah.



Gambar 1 : Model Generik KP3HP dalam Klaster Industri Pertanian

Beberapa pengertian elemen-elemen pada KP3HP tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Usaha Inti

- Gabungan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam KP3HP yang merupakan fokus perhatian dan dijadikan titik masuk pilot proyek;
- Dapat merupakan sentra pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah/daerah;
- Industri pengolahan hasil pertanian yang dicirikan dengan adanya manajemen dan inovasi teknologi yang memadai.

2. Pemasok

- Petani/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang memasok bahan baku untuk kelompok usaha industri pengolahan hasil pertanian.
- Yang dipasok antara lain meliputi : Bahan baku utama, bahan tambahan, aksesoris.

3. Pasar/ Konsumen

- Dapat berupa pasar industri, distributor atau pemakai langsung;

4. Industri Pendukung

- Meliputi usaha jasa dan barang, termasuk layanan pembiayaan. Industri pendukung ini antara lain terdiri dari :

Peralatan mesin (Permesinan, Alat Bantu);

Pengemasan;

Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis.

5. Lembaga dan Sarana Pendukung

- Pembiayaan (Bank, Modal Ventura, Lembaga Ekonomi Mikro dll);

- Jasa (Angkutan, Bisnis Distribusi, Konsultan Bisnis);
- Infrastruktur (Jalan Raya, Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, Telekomunikasi, Listrik dll);
- Lembaga pemerintah, penentu kebijakan atau melaksanakan peran publik;
- Asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota;
- Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang bekerja pada bidang khusus yang mendukung.

Dalam Pedoman umum ini, istilah KP3HP memiliki pengertian lebih luas dari "sentra industri" yang telah dikenal umum. Sentra industri lebih merupakan pengelompokan aktivitas bisnis yang serupa di suatu lokasi. Suatu atau beberapa sentra industri bisa merupakan bagian integral dan sebagai "titik masuk (*entry point*)" dari upaya penumbuhan KP3HP.

2.1.1. Keterkaitan konsep KP3HP dengan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian.

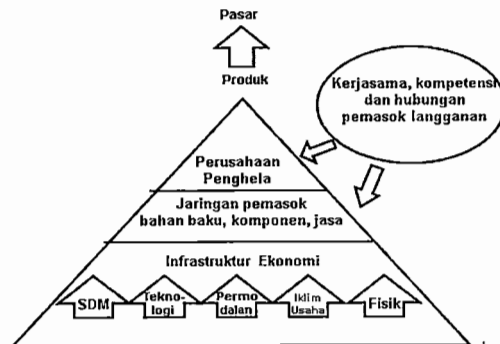
Penumbuhan KP3HP, utamanya dirancang dan diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan. Dalam kaitan ini, beragam kajian konsep dan empiris penumbuhan KP3HP atau industri pertanian mengungkapkan beragam "temuan" penting, yaitu antara lain adalah :

- a. Kesejahteraan/kemakmuran sangat ditentukan oleh "nilai tambah dan daya saing." Karenanya, di antara berbagai tujuan/ kepentingan pembangunan yang multidimensi (dan seringkali berbeda, bahkan "bertentangan"), peningkatan nilai tambah dan daya saing merupakan salah satu fokus orientasi agenda yang sangat penting.
- b. Di antara ukuran yang paling sesuai dari nilai tambah dan daya saing adalah "produktivitas," yang merupakan hasil dari pemanfaatan SDM, modal dan SDA, dan tercermin dalam "nilai" produk (barang dan/atau jasa) dan "efisiensi" bagaimana produk tersebut dihasilkan.
- c. Sumber terpenting kesejahteraan/ kemakmuran (yaitu nilai tambah dan daya saing) pada dasarnya "diciptakan," bukan diwariskan. Beragam faktor alamiah (seperti melimpahnya sumber daya alam) tentu sangat penting, namun hal ini bermakna sangat terbatas jika tidak diimbangi dengan kemajuan dalam kemampuan faktor-faktor "buatan" seperti SDM yang semakin berkualitas, infrastruktur, teknologi dan lainnya.

- d. Produktivitas suatu wilayah/daerah di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bergantung pada keseluruhan industrinya, yang pada dasarnya tercermin dalam keberhasilan penumbuhan KP3HP. Keunggulan nilai tambah dan daya saing mencerminkan keadaan perkembangan ekonomi (*the state of economy's development*).
- e. Inovasi teknologi semakin penting dalam menentukan produktivitas dan peningkatannya dalam jangka panjang.
- f. Faktor spesifik lokasi/ daerah seperti pengetahuan, hubungan, dan motivasi, semakin menentukan keunggulan daya saing nasional maupun global.

Penumbuhan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) bermanfaat untuk :

- Sinkronisasi pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan produk hasil olahan hasil pertanian dalam menghadapi pasar domestik dan pasar internasional
- Meningkatkan pendapatan wilayah/daerah melalui pengembangan wilayah produksi bahan baku untuk memasok bahan baku bagi usaha pengolahan hasil pertanian
- Meningkatkan partisipasi aktif dalam mendorong berputarnya kembali roda perekonomian wilayah/daerah yang mengakar di masyarakat
- Mengupayakan ketersediaan kebutuhan produk olahan yang berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



Gambar 2 : Model Ekonomik Penumbuhan KP3HP

Penumbuhan KP3HP merupakan solusi penting untuk menjembatani keinginan pembeli/konsumen dan karakteristik produk pertanian yang variatif dan tidak bisa disimpan. KP3HP mempunyai rentang pengertian yang amat lebar. Dari yang sangat *soft* berupa pengolahan hasil pertanian seperti pengawetan hasil pertanian segar (sayur dan

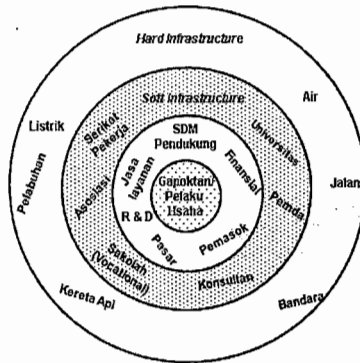
buah) sampai yang punya *value added* tinggi di mana produk pertanian diekstrak dan dikombinasi dengan produk lain seperti pada industri susu bubuk (Joewono.H.H, 2001).

2.1.2. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penumbuhan KP3HP

Jika dilihat dari peran strategis industri kecil rumah tangga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (agroindustri) dalam pembangunan ekonomi pedesaan, maka sudah sepantasnyalah jika pelaku pembangunan utama terlibat dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program kegiatan penumbuhan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) dalam klaster agroindustri. Aktor-aktor tersebut meliputi :

- ☒ Usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai anggota masyarakat yang menjadi sasaran proses perubahan.
 - Usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai sasaran pembangunan memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman mereka dengan teknologi dan struktur sosial masyarakat mereka.
 - Akan lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam program pembangunan jika ikut bertanggung jawab didalamnya.
 - Banyak persoalan pembangunan yang tidak mungkin dilakukan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.
- ☒ Pemerintah (kementerian pertanian) dalam hal ini adalah Ditjen PPHP, eselon 1 teknis lainnya, sebagai fasilitator dengan sistem *Bottom Up* yang memperhatikan keinginan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dengan kata lain masyarakat yang selama ini dianggap sebagai objek pembangunan, maka sekarang diikutsertakan dalam menentukan apa yang menurut mereka baik dan sesuai dengan keadaan mereka.
- ☒ Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan memberikan fasilitas pendanaan yang berupa layanan jasa: leasing, factoring, modal ventura, resi gudang, bursa saham dan pasar modal)
- ☒ Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta), konsultan dan LSM yang berfungsi sebagai pakar, penyedia informasi IPTEK dan dukungan

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pendampingan (Tri Dharma Perguruan Tinggi).



Gambar 3 : Hard Infrastructure dan Soft Infrastructure KP3HP

Terbentuknya pengelompokan (aglomerasi) pelaku usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian harus berdasarkan kesepakatan bersama. Pelaku-pelaku usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang mempunyai tujuan dan visi yang sama dan saling mempercayai untuk kepentingan bersama berkelompok tanpa membentuk organisasi fisik usaha baru. Di dalam kawasan ini terdapat pelaku inti yang menjadi penghela kelompok-kelompok lainnya. Industri/ Perusahaan inti (*champion*) dan mitra (usaha kecil) memperhatikan dan memutuskan skala usaha bersama (teknologi dan sosio-teknologi, jenis produk, biaya produksi, ongkos transaksi, pemasaran, dll.).

Struktur Usaha dalam Klaster KP3HP merupakan cakupan kekuatan usaha (kompetensi inti dalam volume produksi, luasnya pasar dan besarnya biaya transaksi); serta Koordinasi antar unit usaha (inti dengan mitra, mitra dengan mitra yang menghasilkan multi potensi koordinasi). Di dalam klaster KP3HP terdapat ketergantungan strategis (vertikal, didalam industri, dengan industri terkait).



Gambar 4 : Siklus Pertumbuhan KP3HP

2.2. Permasalahan Penumbuhan KP3HP

Pada umumnya budaya petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian pada saat ini, dalam melakukan usahanya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (*subsisten*), jadi belum berorientasi pada pasar (*market oriented*).

Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian belum memiliki bentuk organisasi yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat, karena struktur organisasi internalnya masih sederhana (mendekati organisasi lini) dan tidak memiliki *job description* yang jelas. Seringkali tugas dan wewenang personilnya saling *overlap* misalnya manajer umum (yang juga *owner*) merangkap jabatan sebagai *controller* dan kadang-kadang sebagai pelaksana produksi. Bagian pemasaran, produksi atau keuangan diserahkan pada anggota keluarga yang lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya internal audit karena saling maklum (keluarga sendiri). Ini menjebak masuk ke dalam manajemen yang tidak profesional. Untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu peningkatan kemampuan personal (komunikasi dan kerjasama tim) serta kemampuan manajerial (kepemimpinan dan manajemen yang bersifat fungsional bukan lini) serta perbaikan iklim usaha dan budaya kerja.

Secara umum kondisi sekarang dan kondisi baru yang diharapkan oleh penumbuhan KP3HP dapat digambarkan secara ringkas dalam bagan berikut ini :

Kondisi Sekarang
Kurangnya budaya kewirausahaan
Rendahnya kemampuan sumber daya manusia
Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi pengolahan yang rendah
Kurangnya informasi/penguasaan pasar
Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja
Belum memiliki bentuk organisasi dan manajemen yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat
Masih dirasakan adanya budaya lebih menyukai produk impor oleh sebagian konsumen.
Masih kurangnya "political will" pemerintah



Kondisi baru/yang diharapkan
Pertanian yang berorientasi pasar
Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi
Peningkatan ilmu dan penguasaan teknologi pengolahan tepatguna yang bisa mendukung inovasi.
Peningkatan sistem manajemen informasi dan perluasan pangsa pasar
Kecukupan modal guna pengembangan usaha dan kelanjutan usaha
Terbentuknya organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat dan manajemen yang profesional.
Adanya budaya cinta produk nasional
Adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani/ pelaku usaha pengolahan.

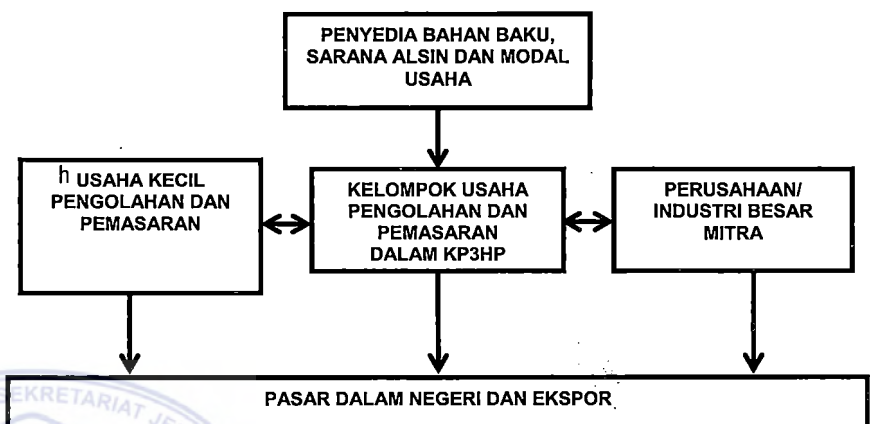
2.3. Strategi Penumbuhan KP3HP

Petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian di Indonesia pada umumnya masih bersifat subsisten. Oleh karena itu, untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian yang efisien dan berdaya saing tinggi, maka alur penyusunan program pengembangannya dengan memperhatikan tentang bagaimana upaya menguasai pasar utama produk industri pengolahan di dalam negeri, menuju pasar ekspor. Di samping itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian juga didasarkan pada kaidah keunggulan komparatif, yakni peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, dan keterpaduan usaha, baik keterpaduan komoditi, usahatani maupun wilayah. Implementasi dari hal itu, maka dalam pembangunan industri pengolahan, harus selalu berbasis pada petani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), mengubah peran petani dari sekedar produsen menjadi penyedia bahan baku industri (*supplier*).

Dalam upaya peningkatan akses pasar, sangat diperlukan pemahaman menyeluruh tentang 'Market Driven' bagi petani, terutama dalam hal perencanaan produksi, panen, pasca panen dan pengolahan yang lebih diselarskan pada permintaan pasar. Itulah sebabnya, ke depan akan dilakukan perubahan orientasi pembinaan dan reposisi petani/ pelaku usaha, yang meliputi tiga hal utama. Pertama, petani diarahkan untuk tidak sekedar sebagai 'produsen',

namun diarahkan untuk berperan sebagai *supplier* atau penyedia bahan baku industri. Dengan reposisi ini, petani dapat melakukan upaya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, baik dari aspek kualitas, waktu penyediaan, sistem pengiriman, maupun efisiensi produksi yang berkaitan dengan harga. **Kedua**, petani dilibatkan secara aktif sebagai pelaku pasar di tingkat produsen, sehingga terbentuk dan berkembang suatu sistem pemasaran ditingkat petani atau disebut dengan pasar tani. **Ketiga**, GAPOKTAN diarahkan untuk menjadi basis dan landasan dalam peningkatan nilai tambah, daya saing dan posisi tawarnya. Dengan reorientasi dan reposisi tersebut, diharapkan posisi tawar petani dapat menjadi lebih proporsional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas serta nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian dalam negeri.

Model interaksi antara petani/ pelaku usaha dengan pihak industri pengolahan adalah dengan model '*Core Satellite System*', yang mirip dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR), namun dengan melibatkan sektor swasta dalam perusahaan inti (*Corporate Core*). Dalam model interaksi ini, pihak industri berhubungan dengan petani melalui sistem kontrak. Sistem kontrak yang disepakati meliputi pembelian hasil-hasil pertanian, pertukaran input pertanian untuk jaminan penjualan bahan baku, dan adanya jaminan harga. Sistem ini dapat dijadikan sebagai usahatani satelit (*Satelit Farming*) di sekitar perusahaan inti. Dengan sistem inti dan satelit antara industri dan petani seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang diterima, sekaligus menguntungkan bagi industri pengolahan karena adanya jaminan kontinuitas pasokan bahan baku. Model interaksi dalam penumbuhan KP3HP dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 5 : Model Interaksi dalam Penumbuhan KP3HP

2.4. Kebijakan Penumbuhan KP3HP

Kebijakan dasar penumbuhan KP3HP adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta pengusaha/ industri kecil rumah tangga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam suatu kelompok usaha bersama dalam suatu kawasan (KP3HP) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan usaha ekonomi rakyat dan menjadi peran utama pembangunan pertanian di pedesaan. Sedangkan kebijakan operasional yang akan dilakukan adalah meliputi :

- Membentuk kelompok usaha bersama dalam kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) dari usaha kecil rumah tangga di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di pedesaan.
- Meningkatkan kemampuan organisasi/ kelembagaan dan manajerial usaha kecil rumah tangga/ Kelompok usaha dalam KP3HP
- Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar produk olahan hasil pertanian
- Meningkatkan kemampuan akses terhadap modal usaha dan memperkuat struktur permodalan.
- Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi tepatguna
- Pengembangan kemitraan usaha antara KP3HP dengan industri besar/ super market. Ada tiga pola kemitraan usaha yang dapat diterapkan pada KP3HP, yaitu :

1. Pola Inti-Plasma

Hubungan antara kelompok usaha dalam KP3HP sebagai plasma dengan perusahaan/ industri besar sebagai inti yang bermitra. Kelompok usaha dalam KP3HP (plasma) memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai persyaratan dan perusahaan inti menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen serta menangkap hasil produksi, mengolah dan memasarkannya.

2. Pola Sub-Kontrak

Kelompok usaha dalam KP3HP yang memproduksi kebutuhan perusahaan mitra sebagai bagian dari komponen industrinya dengan cara membuat kontrak kerjasama penyediaan bahan baku industri.

3. Pola Dagang

Kelompok usaha dalam KP3HP menyediakan hasil produksinya untuk perusahaan/ industri besar (super market/ pasar swalayan) dan memasarkan hasil usahanya sesuai kebutuhan.

Sasaran Penumbuhan KP3HP dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Sasaran Penumbuhan KP3HP

PRODUKSI	PEMASARAN	SDM	TEKNOLOGI
• Meningkatkan kemampuan manajemen & teknik produksi • Meningkatkan kemampuan rancang bangun / rekayasa • Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana / prasarana	• Meningkatkan kemampuan manajemen & teknik pemasaran • Melaksanakan penelitian & pengkajian pemasaran • Dukungan sarana & promosi / uji coba pasar • Pengembangan lembaga pemasaran & jaringan distribusi • Memasarkan produk Usaha Kecil	• Membudayakan kewirausahaan • Meningkatkan kemampuan teknis & manajerial • Mengembangkan lembaga diklat & konsultasi • Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan	• Meningkatkan kemampuan teknik produksi & pengendalian mutu • Meningkatkan kemampuan litbang desain baru • Insentif bagi Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru & berwawasan lingkungan • Mempercepat alih teknologi • Mengembangkan lembaga litbang (R&D)

2.5. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penumbuhan KP3HP adalah meliputi :

- Terjadinya peningkatan produksi, produktivitas, efisiensi dan pendapatan kelompok usaha dan anggota kelompok usaha dalam KP3HP.
- Tumbuhnya KP3HP yang maju (modern), berdaya saing dan mandiri serta mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan.
- Terjadinya peningkatan nilai tambah dan tercapainya pemupukan modal usaha kelompok usaha pengolahan dalam KP3HP.
- Terjadinya perubahan dari usaha subsisten menjadi usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berorientasi komersil/ bisnis sehingga petani/ pelaku usaha tidak saja sebagai produsen tetapi juga sebagai pemasok (supplier) bahan baku industri..
- Tumbuhnya kemitraan usaha antar kelompok usaha pengolahan dengan mitra usaha sedang atau besar.
- Terjadinya peningkatan kemampuan manajerial kelompok usaha.



BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Untuk melaksanakan kegiatan KP3HP ini dibutuhkan gugus pelaksana tugas yang berasal dari *stake holder* KP3HP. Ditjen PPHP memayungi aktor pengembangan klaster dan kawasan yang terpilih. Untuk melakukan pemilihan ditunjuk Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi/Konsultan) yang bertugas menyeleksi dan mencari kawasan dan unit usaha penghela yang berasal dari *database* yang dimiliki oleh Ditjen PPHP.

3.1. Tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian) dibentuk kelembagaan sebagai berikut :

- a. **Tim Pengarah (*Steering Committee*)**, berfungsi untuk memfasilitasi, memberi arah kebijakan dan strategi agar kegiatan penumbuhan KP3HP berjalan lancar sesuai target yang telah ditentukan.

Tim pengarah terdiri dari Ditjen PPHP (eselon 1 dan 2), dan bisa diperkuat dari eselon 1 lainnya di Kementan.

Tugas Tim Pengarah (*Steering Committee*), adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan, strategi dan memberikan arahan umum tentang pelaksanaan program penumbuhan KP3HP;
- 2) Menetapkan lokasi KP3HP;
- 3) Memberikan fasilitasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan serta bimbingan teknis program penumbuhan KP3HP;
- 4) Melakukan koordinasi lintas sektor/sub sektor untuk meningkatkan gerakan dan efektifitas program penumbuhan KP3HP;
- 5) Melakukan pemantauan dan pengendalian program penumbuhan KP3HP serta pelaporan

- b. **Kelompok Kerja (*Working Group*)** adalah satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penumbuhan KP3HP di suatu wilayah/daerah.

Kelompok kerja (*working group*) terdiri dari unsur dari Ditjen PPHP bagian perencanaan, direktorat yang membidangi masalah teknis, bisa diperkuat dari Perguruan Tinggi dan Dinas Provinsi yang terkait.

Tugas kelompok kerja (*Working Group*) adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan operasional penumbuhan KP3HP sesuai kondisi lapangan kabupaten/kota (spesifik lokasi);

- 2). Mengkoordinir penumbuhan KP3HP dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 3) Memfasilitasi penerapan teknologi alat mesin pengolahan tepat guna dan penerapan manajemen usaha, manajemen mutu, dan manajemen pemasaran hasil pertanian yang modern;
- 4) Memfasilitasi, mencari dan menciptakan pangsa pasar hasil olahan;
- 5) Menjembatani akses pendanaan/ modal usaha dengan lembaga keuangan di lapangan (Kabupaten/ Kota);
- 6) Melakukan koordinasi lintas sektor/sub sektor untuk meningkatkan gerakan dan efektifitas pelaksanaan penumbuhan KP3HP;
- 7) Melakukan pemantauan dan pengendalian serta melaporkan hasilnya kepada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Peretanian.

3.2. Tingkat daerah/ lapangan (klaster), dibentuk kelembagaan sebagai berikut :

a. KP3HP (*Focal Point*)

KP3HP adalah gabungan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang beranggotakan para pelaku usaha (industri kecil dan rumah tangga) yang tumbuh berdasarkan kesamaan produk olahan, keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para anggotanya dalam mengelola sumberdaya untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Keadaan ini dicapai melalui upaya peningkatan produktivitas usaha dalam skala ekonomi yang menguntungkan demi peningkatan daya saing, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Focal Group terdiri atas kelompok pelaku usaha bersama yang saling terkait (KP3HP), dengan dipimpin oleh seorang pelaku usaha yang mengambil peran dan inisiatif berdasarkan kesepakatan bersama anggota dalam KP3HP.

Prinsip-prinsip penumbuhan KP3HP adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan keputusan mutlak dilakukan oleh anggota kelompok usaha dalam KP3HP yang diambil secara musyawarah dan mufakat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota kelompok (dari, oleh, dan untuk anggota kelompok dalam KP3HP)
- 2) Peran pemerintah terbatas pada fasilitasi kepada kelompok usaha pengolahan sehingga kelompok usaha ini mampu menggunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui kreatifitasnya sendiri dalam

mencapai tujuan meningkatkan pendapatan dan sekaligus mensejahterakan anggotanya.

- 3) Pemberdayaan kelompok usaha ini mencakup berbagai aspek, antara lain aspek manajemen, produksi, teknologi, peningkatan sumber daya manusia (anggota kelompok) dan aspek wirausaha.
- 4) KP3HP menetapkan pengurus dengan susunan organisasi yang disepakati oleh anggota dan dipilih secara demokratis oleh anggota.

Fasilitasi dalam rangka penumbuhan KP3HP pada kelompok usaha pengolahan difokuskan pada aspek-aspek :

- 1) *Manajemen usaha*, mulai dari perencanaan usaha (penyusunan rencana usaha kelompok/ RUK), permodalan, manajemen produksi, manajemen pengolahan hasil, dan manajemen pemasaran,
- 2) *Teknis pengolahan*, mulai proses pembersihan (*cleaning*), pemisahan/ sortasi (*grading*), pengolahan (*processing*), pengawetan, penyimpanan/ pergudangan (*warehousing*), pengepakan (*packaging*) dan transportasi serta pemasaran (*marketing*), pemanfaatan sarana dan teknologi tepat guna spesifikasi lokasi;
- 3) *Penguatan modal usaha*, dimaksudkan sebagai stimulan untuk lebih memberdayakan modal kelompok usaha yang sudah ada;
- 4) *Kelembagaan*, mulai dari kerjasama kelompok, antar kelompok dan kemitraan usaha.

b. Tenaga Pendamping (Fasilitator)

Tenaga pendamping atau fasilitator adalah tenaga ahli (pakar) atau penyuluh pertanian yang kompeten yang direkrut oleh Perguruan Tinggi (Konsultan) yang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan sosialisasi dan rekayasa sosial agar pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dapat membentuk kelompok usaha dalam kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) berdasarkan kesamaan produk olahan, keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam mengelola sumberdaya untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Keadaan ini dicapai melalui upaya peningkatan produktivitas usaha dalam skala ekonomi yang menguntungkan demi

peningkatan daya saing, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

- 2) Memotivasi dan memfasilitasi KP3HP dalam aspek pengorganisasian, perencanaan usaha produksi, pelaksanaan usaha/ produksi dan pemasaran hasil produksi serta menganalisis kelayakan usaha.
- 3) Posisi di sudut netral;
- 4) Memfasilitasi tahapan diagnosis, sosialisasi konsep penyusunan rencana aksi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- 5) Mobilisasi dan pemberdayaan KP3HP dalam pemanfaatan akses inovasi teknologi alat mesin pengolahan hasil pertanian tepat guna secara optimal.
- 6) Memfasilitasi akses permodalan, bahan baku, mutu produk olahan dan pemasarannya.
- 7) Memfasilitasi terciptanya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan serta mendorong saling taat terhadap kesepakatan usaha (MOU).
- 8) Melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan ke Ditjen PPHP Kementan.

BAB IV

LANGKAH OPERASIONAL PENUMBUHAN KP3HP

Kelembagaan KP3HP merupakan agregat atau himpunan (aglomerasi) dari beberapa kelompok usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah/daerah. Kelembagaan KP3HP yang dimaksud disini adalah suatu lembaga informal terorganisir dalam bentuk gabungan kelompok usaha yang ada dalam masyarakat yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menangani dan mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Lembaga KP3HP berupaya memfasilitasi pelaku usaha (industri kecil rumah tangga) agar mampu menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri untuk melakukan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian guna mensejahterakan anggotanya.

Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dilapangan atau di daerah adalah sebagai berikut :

4.1. Sosialisasi Penumbuhan KP3HP

Sosialisasi penumbuhan KP3HP dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi antara pusat dan daerah untuk mempersiapkan setiap pihak yang terlibat (aparatur terkait, petugas PEMDA, penyuluh, petani dan pelaku usaha (industri kecil/ rumah tangga), tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya) dalam kegiatan penumbuhan KP3HP, agar mereka mampu melaksanakan peran dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kota, maupun di tingkat kelompok usaha pengolahan hasil pertanian dan atau KP3HP. Sosialisasi kepada kelompok usaha dan/atau KP3HP secara detail dengan menjelaskan teknis dan manajemen, aturan, hak, dan kewajiban kelompok usaha maupun anggotanya.

4.2. Penentuan Lokasi dan Komoditas

Penentuan lokasi kawasan, komoditas yang dikembangkan serta unit usaha dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat ditunjuk sebagai pelaksana pemilihan kawasan dan unit usaha beserta komoditas yang dikembangkan. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki kredibilitas dalam pengembangan kawasan-kawasan pertanian serta memiliki unit lembaga pengabdian pada masyarakat.

a. Penentuan Lokasi

Pemilihan/ penentuan calon lokasi penumbuhan KP3HP didasarkan atas potensi sumberdaya yang merupakan kawasan sentra produksi unggulan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, memiliki bahan baku hasil pertanian yang kontinyu dan cukup,

tersedianya sarana teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tepat guna, adanya dukungan pemerintah daerah dengan komitmen pada pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara menyeluruh, tersedianya aksesibilitas dan transportasi yang memadai, dan memiliki sumberdaya manusia yang dapat ditingkatkan kualitasnya bagi upaya penerapan sarana teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tepat guna. Secara sosial, teknis dan ekonomi KP3HP layak dikembangkan di wilayah/ daerah tersebut.

Identifikasi kawasan dilakukan dengan metode Gap Analisis. Konsultan/Perguruan Tinggi pelaksana mengidentifikasi kebutuhan suatu kawasan pengembangan KP3HP dan membandingkan dengan keadaan nyata di lapangan. Dari hasil analisa tersebut diperoleh empat kriteria kawasan

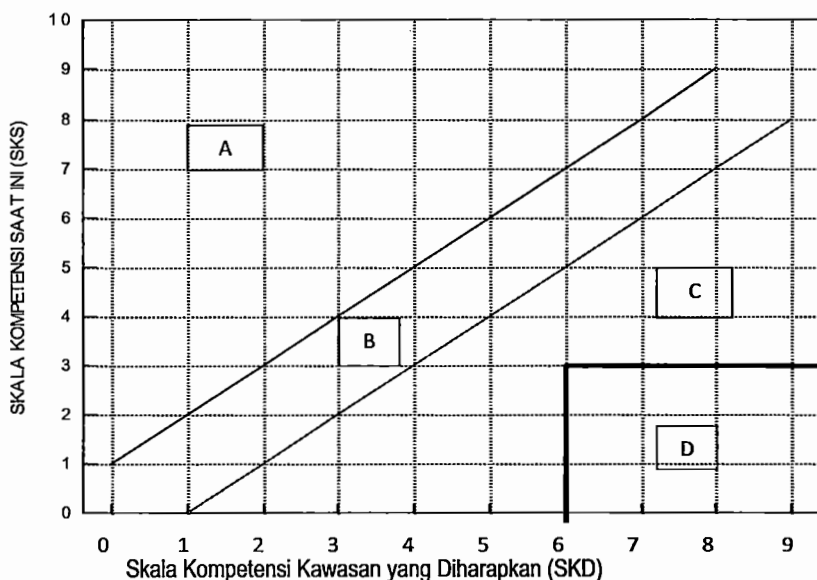


Diagram peringkat kawasan

Rekomendasi oleh pelaksana identifikasi (perguruan tinggi) diberikan dalam bentuk:

- Kawasan Level A : kawasan yang sangat disarankan untuk KP3HP
- Kawasan Level B : kawasan yang disarankan namun perlu pendampingan dan sentuhan dari Ditjen PPHP
- Kawasan Level C : kawasan yang kurang disarankan untuk KP3HP namun perlu pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif;
- Kawasan Level D : kawasan yang tidak disarankan untuk KP3HP

Hasil seleksi kawasan ini diberikan kepada tim pengarah (steering committee), yang akan memutuskan KP3HP, beserta komoditas dan unit usahanya. Contoh kuesioner penyeleksian kawasan dapat dilihat pada lampiran.

b. Penentuan komoditas

Pemilihan komoditas olahan komersil di dasarkan pada potensi pasar, bersifat strategis dan mudah diusahakan dengan sarana dan teknologi tepat guna, serta merupakan komoditas unggulan daerah bersangkutan. Jenis komoditas olahan (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang dihasilkan diupayakan sesuai dengan sarana teknologi alat mesin yang tersedia dan dapat dikembangkan secara lebih modern (skala luas). Komoditas yang dipilih sesuai dengan Renstra Ditjen PPHP seperti yang sudah disebutkan di atas.

c. Identifikasi Unit-Unit Pelaku Usaha dan Pemilihan Unit Usaha Penghela

Pelaksana identifikasi melakukan identifikasi pelaku usaha dari komoditas terpilih dan unit usaha yang menjadi penghela (champion) bagi kegiatan KP3HP. Unit-unit usaha yang diidentifikasi dan potensial untuk bergabung dalam KP3HP memiliki persyaratan umum :

- Mengusahakan komoditas unggulan yang telah terpilih/ditentukan
- Memiliki jaringan kemitraan dengan gapoktan/poktan sebagai penyedia bahan baku.
Jaringan kemitraan ini dibuktikan dan atau diperkuat dalam bentuk kesepakatan kerjasama atau kemitraan usaha.
- Pelaku unit usaha yang akan digabungkan memiliki skala usaha kecil dan mikro
- Unit-unit usaha yang ditetapkan dalam KP3HP harus mencapai skala ekonomi, sehingga layak untuk bergabung dalam KP3HP
- Pelaksana identifikasi juga melakukan identifikasi unit-unit usaha lainnya beserta lembaga pendukung dan penunjang kawasan KP3HP
- Pelaku usaha yang menjadi penghela (champion) adalah unit pelaku usaha yang memiliki keunggulan dan berpotensi besar untuk tumbuh sebagai penggerak kawasan KP3HP.

Konsultan pelaksana identifikasi juga melakukan Analisis Kebutuhan (Need Assesmen) dari unit-unit usaha yang akan bergabung dalam KP3HP dan pelaku usaha penghela (champion), yakni :

- Mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha inti/penghela dan kelompok usaha dalam KP3HP sesuai dengan Tupoksi PPHP
- Mengidentifikasi kebutuhan kawasan sesuai dengan Tupoksi PPHP
- Mengidentifikasi skala usaha pelaku utama/penghela serta klaster di kawasan KP3HP

4.3. Bantuan Peralatan Mesin

Untuk menunjang pelaksanaan program penumbuhan KP3HP Ditjen PPHP Kementan menyediakan bantuan dalam bentuk pengadaan sarana alat mesin pengolahan hasil pertanian. Bantuan alat ini berasal dari analisis kebutuhan yang tujuan bantuan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, diversifikasi dan mutu produk olahan hasil pertanian pada KP3HP. Bantuan sarana alat mesin pengolahan dilakukan konsultan/ perguruan tinggi pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha industri pengolahan dalam KP3HP di lapangan. Jenis paket bantuan berupa sarana alat mesin pengolahan hasil pertanian.

4.4. Pendampingan

Pendampingan oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memberdayakan KP3HP agar dapat mandiri dan profesional dalam berusaha industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan pendampingan ini diharapkan KP3HP secara teknis dan manajemen dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Disamping itu melalui pendampingan KP3HP diharapkan dapat mengakses permodalan, memperluas akses pemasaran dengan jalan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

4.5. Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

a. Pengendalian

Kegiatan pengendalian kegiatan penumbuhan KP3HP dilakukan melalui jalur struktural dan jalur informal (non struktural). Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Kelompok Kerja (Working Group) pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Sedangkan melalui jalur informal dilakukan mulai dari Perguruan Tinggi/ Konsultan. Pengendalian dilakukan berdasarkan perencanaan yang memperhatikan asas akuntabilitas kinerja.

b. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan program penumbuhan KP3HP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan anggaran dan kegiatan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah seperti Itjen, BPK dan BPKP. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara dini oleh Tim Pengarah (Steering Committee), dan Kelompok Kerja (Working Group) di Ditjen PPHP.

Disamping itu dilakukan pengawasan jalur masyarakat melalui pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat seperti kelompok usaha pengolahan dalam KP3HP,

Perguruan Tinggi/ Konsultan, LSM, Pers, Pendamping (Fasilitator)/ Penyuluh yang dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau forum komunikasi.

c. Pelaporan

Guna melihat kinerja program penumbuhan KP3HP diperlukan laporan pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan pengendalian yang ketat dan lengkap. Jenis-jenis pelaporan terdiri dari :

- 1) Laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan oleh Pendamping (Fasilitator) melalui Perguruan Tinggi (Konsultan).
- 2) Laporan insidental bila diperlukan.

Format laporan berkala, baik isi dan batas waktu serta mekanisme pengirimannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk laporan insidental menggunakan format yang disepakati oleh Perguruan Tinggi (Konsultan) dan agar dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh Kelompok Kerja (*Working Group*) Ditjen PPHP.

4.6. Pendanaan

Kegiatan penumbuhan KP3HP harus berkelanjutan atau bersifat multi years. Pada tahun 2013 kegiatan penumbuhan KP3HP dibiayai dari APBN Ditjen PPHP Kementan.

4.7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan KP3HP

1. Menyusun SK Ditjen PPHP tentang Anggota Tim Pengarah (*Steering Committee*) dan Kelompok Kerja (*Working Group*)
2. Mempersiapkan dan melaksanakan temu koordinasi (dialog yang konstruktif);
3. Mempersiapkan dan melaksanakan rapat teknis;
4. Pelelangan/ Pemilihan Perguruan Tinggi (Konsultan)
5. Seleksi/ Pemilihan Tenaga Pendamping KP3HP
6. Survey/ Seleksi CP/CL KP3HP
7. Mengidentifikasi KP3HP sebagai pemeran kunci (*champion*);
8. Pembentukan kelembagaan KP3HP
9. Pengumpulan data, menganalisa, membentuk pengertian bersama;
10. Menetapkan prioritas masalah, strategi dan rencana aksi penumbuhakan KP3HP;
11. Pengadaan peralatan mesin pengolahan sesuai kebutuhan
12. Pembinaan, bimbingan teknis dan manajemen serta pendampingan

13. Public Awareness (Pembuatan video *instructional* *sukses story* industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian)
14. Workshop
15. Pengendalian dan Pengawasan
16. Pelaporan

BAB V.

POLA PEMBINAAN DAN TAHAPAN PENUMBUHAN KP3HP

5.1. Program Aksi dan Tahapan Penumbuhan KP3HP

Ada lima program aksi dan tahapan penumbuhan KP3HP, yaitu :

5.1.1. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)

Sebagai titik masuk (*entry point*) dari pemberdayaan SDM pada KP3HP adalah menyadarkan petani/ pelaku usaha pengolahan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri mereka, bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang mereka miliki sekarang masih bisa ditingkatkan. Dengan kesadaran dan percaya diri akan tumbuh motivasi dikalangan masyarakat untuk maju, sehingga mereka akan lebih mudah menerima dan tanggap terhadap setiap perubahan yang dianjurkan (tahap I dan tahap III). Pembinaan manusia sementara diarahkan kepada SDM yang memiliki 4 (empat) sifat (*catur gatra*), yaitu : berbudi pekerti luhur, tekun dan kerja keras, maupun kerjasama dan memiliki sifat inovatif.

5.1.2. Pengembangan Permodalan

Bagi wilayah/ daerah yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan; terutama pembangunan ekonomi, dimulai dengan berbagai bantuan dalam bentuk Bantuan Cuma-cuma (Hibah) atau Bantuan Bergulir. Bantuan yang diberikan didasarkan atas kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh KP3HP, bukan bantuan yang diberikan secara begitu saja. Untuk itu terlebih dahulu haruslah dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan KP3HP, dan atas dasar hasil analisa kebutuhan itulah maka bantuan itu diberikan. Bagi wilayah/ daerah yang sudah banyak tersentuh pembangunan, bantuan permodalan bagi usaha ekonomi pengolahan hasil pertanian atau KP3HP sudah dapat diberikan dalam bentuk Kredit Subsidi atau Kredit Komersial dengan kemudahan khusus (tanpa jaminan dan prosedurnya mudah). Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha pengolahan hasil pertanian saja, tapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik *on-farm* (budidaya) maupun *off-farm* seperti usaha sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, perdagangan maupun pelayanan jasa keuangan/simpan pinjam dan lain-lain. Perjanjian kredit atau perjanjian lain yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan, hendaknya diketahui atau merupakan tanggung jawab KP3HP.

Akhirnya apabila sudah beberapa kali mampu mengembalikan Kredit Komersial ini dengan lancar, maka kita tingkatkan pada Kredit Komersial Penuh. Dengan cara demikian maka kita berhasil mendidik mereka menjadi mandiri dalam kebutuhan permodalan usaha. Artinya, apabila mereka membutuhkan tambahan modal bagi pengembangan usahanya mereka mampu berhubungan langsung dengan bank (lembaga keuangan formal) sendiri dan mampu memenuhi persyaratan bank (bankable).

5.1.3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku industri pengolahan hasil pertanian pada KP3HP adalah dikembangkannya Kelembagaan Ekonomi Mikro yaitu suatu kelembagaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, bukan kelembagaan yang dibentuk untuk kepentingan Instansi Pembina. Ini sangat penting, karena hanya kelembagaan yang tumbuh dari bawah itulah yang akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Secara skematis tahapan pengembangan kelembagaan ekonomi mikro pada KP3HP dapat dilihat pada gambar 9.

Seperti diketahui, Ekonomi Mikro pada KP3HP adalah suatu usaha ekonomi yang dijalankan oleh anggota KP3HP dan jenisnya sangat beragam mulai dari usaha pengolahan hasil pertanian, jual beli hasil pertanian dsb. Mereka pada umumnya berusaha sendiri-sendiri dengan keterampilan dan modal seadanya.

Langkah pertama dari tahapan ini adalah mereka yang semula berusaha sendiri-sendiri (usaha rumah tangga), kita dorong dan bimbing agar mereka mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Usahanya tetap dijalankan di masing-masing keluarga, hanya mungkin ada aspek yang dikerjakamkan dalam kelompok (sebagai faktor pengikat), seperti pengadaan bahan baku bersama, menjual hasil bersama, mendapatkan modal bersama, dan sebagainya. Anggota kelompok haruslah terdiri dari para petani/ pelaku usaha pengolahan hasil pertanian yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama (ada faktor pengikat), sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.

Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan Gabungan Kelompok Usaha pengolahan hasil pertanian atau disebut sebagai KP3HP. Kelompok-kelompok usaha yang sudah tumbuh dan berjalan secara baik; terutama kelompok-kelompok yang usahanya sejenis seperti : pedagang hasil olahan dan industri makanan ringan, didorong

dan dibimbing agar mereka mau dan mampu bekerjasama antar kelompok, dalam bentuk organisasi yang lebih besar yang disebut KP3HP atau Asosiasi.

KP3HP ini kalau sudah berjalan lancar dan baik, didorong dan dibimbing lagi agar mau dan mampu menjadi salah satu lembaga ekonomi formal dan yang paling tepat tentunya adalah Koperasi. Untuk mencapai itu perlu dilakukan berbagai kegiatan advokasi dan bimbingan teknis dan manajemen, agar mereka benar-benar memahami apa manfaatnya menjadi suatu lembaga ekonomi formal (koperasi).

5.1.4. Pengembangan Usaha

Secara umum usaha industri pengolahan hasil pertanian pada KP3HP memerlukan tahapan perkembangan, terutama bila dikaitkan dengan tingkat kemampuan sumberdaya manusianya dan penggunaan sumberdaya alam.

Lebih jauh, untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, petani dan pelaku usaha pengolahan harus menerapkan/pengembangan usahanya secara efisien dan menguntungkan yang dirancang dalam kapasitas skala ekonomi yang menguntungkan. Upaya tersebut harus dimulai dengan pemilihan komoditas-komoditas pengolahan unggulan, yang kemudian dikembangkan pengelolaannya secara komplementer (saling melengkapi) serta didukung dengan pengembangan processing, sortasi, pengepakan, pemasaran, Industri kecil, industri jasa yang sesuai dengan kondisi wilayah/daerah.

5.1.5. Pengembangan Sarana-Prasarana dan Iklim Usaha

Pengembangan sarana-prasarana yang berwawasan lingkungan yang diperlukan seperti jaringan jalan, transportasi, telekomunikasi, listrik, pasar, gudang dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar dengan efisien dan resiko minimal. Sarana dan Prasarana utama yang perlu dilengkapi pada KP3HP adalah :

1. Pasar

Fungsi pasar adalah sebagai penyedia sarana yang dibutuhkan serta sebagai tempat memasarkan hasil usaha pengolahan. Karena fungsinya yang demikian sangat diperlukan, maka adanya pasar di daerah pengamatan yang letaknya strategis yang dapat mengakses keseluruhan wilayah/ daerah.

2. Lembaga Keuangan

Pada proses awal penumbuhan KP3HP yang dibutuhkan adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana dengan tingkat suku bunga rendah atau tingkat suku bunga yang tersubsidi.

3. Kelembagaan Usaha pada KP3HP

Kelembagaan tani sebagai suatu wadah dalam mendinamisasi kan kegiatan usahatani diperlukan keberadaannya. Kelembagaan tani yang baik adalah kelembagaan yang dapat menggerakkan, mengkoordinasikan anggotanya dalam kegiatan usahatani. Oleh karena itu kelembagaan tani baik formal dan informal sangat diperlukan keberadaannya di daerah pengamatan.

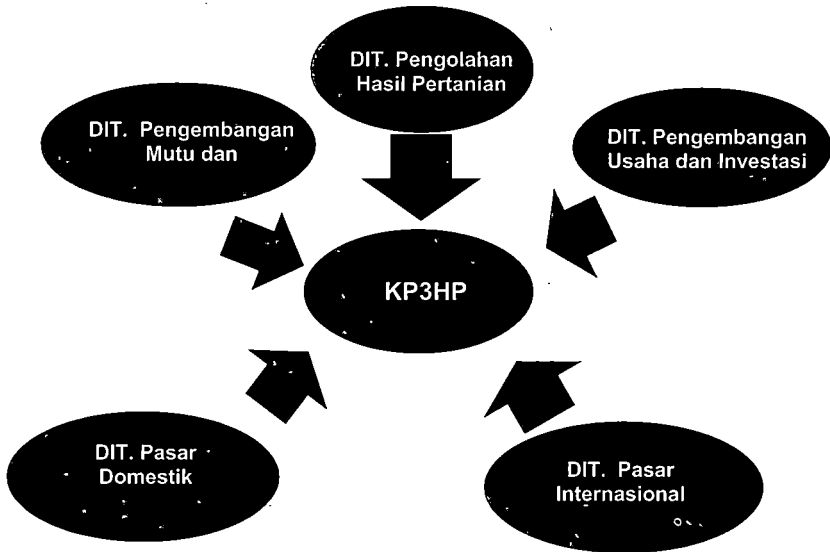
4. Infrastruktur

Infrastruktur yang terdiri dari jaringan jalan adalah sangat penting keberadaannya. Jaringan jalan (transportasi) yang baik (layak) dapat menunjang kelancaran pengangkutan produksi serta komunikasi usaha. Disamping itu pula tingkat *aksesibilitas wilayah* daerah KP3HP dengan kawasan sekitarnya sangat ditentukan oleh kelayakan jaringan jalan.

Pola interaksi pembinaan dalam penumbuhan KP3HP dapat dilihat pada bagan di bawah.

PEMERINTAH	PERBANKAN	INDUSTRI BESAR	MASYARAKAT/ KONSUMEN
• Menciptakan iklim yang kondusif melalui regulasi • Menyusun rencana pembinaan secara makro/ umum • Menyediakan diklat/ SLPTT bagi KP3HP • Melakukan bimtekman/ penyuluhan secara periodik • Melakukan pembinaan melalui penghargaan klas KP3HP	• Memberikan pinjaman/ kredit modal dengan syarat ringan, mudah dan prosedur yang cepat. • Memberikan pendampingan agar petani/pelaku usaha dapat mengembalikan kreditnya	• Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan • Memberi bantuan teknis dan manajemen • Membantu menyediakan jaringan pemasaran dan distribusi • Melatih pembuatan neraca rugi laba dan pembukuan • Melakukan pengkaderan • Melakukan diversifikasi usaha	• Membantu menyerap/ membeli hasil produksi pengolahan hasil pertanian

5.2. Pola Interaksi Pembinaan Penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP



Gambar 6 : Pola Interaksi Pembinaan Penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP

Interaksi pembinaan penumbuhan KP3HP di Ditjen PPHP adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Ditjen PPHP :

- Menyusun pedoman umum pelaksanaan kegiatan penumbuhan KP3HP
- Menyusun peta industri kecil rumah tangga pertanian, dan kelompok usaha dalam KP3HP
- Melakukan SLPPHP pada industri kecil rumah tangga dan kelompok usaha dalam KP3HP

2. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian

- Melakukan pengembangan usaha pada KP3HP sehingga menjadi lembaga formal seperti Kaoperasi/ Perusahaan Perseroan (PT) dll
- Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen pengembangan usaha
- Memfasilitasi bantuan inovasi sarana prasarana teknologi alat mesin pengolahan hasil pertanian tepat guna

3. Direktorat Mutu dan Standarisasi

- Melakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk pertanian

- Melakukan pengawasan mutu produk hasil pertanian dan penerapan SNI
 - Membentuk lembaga penilai kesesuaian terhadap mutu produk hasil pertanian (laboratorium, lembaga sertifikasi)
4. **Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi**
- Melakukan pengembangan permodalan dan melakukan analisis kelayakan investasi usaha pengolahan hasil pertanian
 - Memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi, kemitraan dan kewirausahaan
 - Melakukan promosi dan layanan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
5. **Direktorat Pemasaran Domestik**
- Mengembangkan jaringan pasar domestik dan pelayanan informasi pasar hasil pertanian (segar dan olahan)
 - Regulasi pemasaran domestik produk segar dan olahan hasil pertanian agar tercipta iklim pemasaran yang kondusif
 - Mengembangkan kelembagaan pasar domestik (pasar tani, pasar lelang, pasar ternak dll)
 - Melakukan pemantauan pasar
6. **Direktorat Pemasaran Internasional**
- Mengembangkan jaringan pasar internasional dan memberikan bantuan sarana promosi dan proteksi pemasaran hasil pertanian pada KP3HP
 - Memfasilitasi akses kerjasama pemasaran internasional produk pertanian
 - Melakukan analisis pasar, *Market Intelligent* dan perluasan pasar internasional produk pertanian

BAB VI

PENUTUP

Konsep nilai tambah dan daya saing merupakan kata kunci dalam pembangunan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menuju terciptanya industrialisasi pertanian, oleh karenanya selain sinergi sektoral maka sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian baik secara sektoral maupun antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan keberhasilan pembangunan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang di cita-citakan.

Penumbuhan KP3HP merupakan salah satu terobosan menuju terciptanya industrialisasi pertanian di pedesaan dan merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing dan nilai tambah serta pendapatan petani/ pelaku usaha pengolahan serta merupakan usaha pengembangan perekonomian di suatu wilayah/ daerah.

Penumbuhan KP3HP adalah suatu proses konsolidasi usaha industri pengolahan hasil pertanian yang disertai dengan koordinasi vertikal di antara seluruh tahapan usaha agribisnis mulai dari hulu (penyediaan sarana produksi, usahatani, penyediaan bahan baku) dan hilir yaitu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Jadi industri pengolahan hasil pertanian tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem dan usaha agribisnis terpadu mulai dari hulu hingga hilir.

Dengan semangat otonomi daerah, penumbuhan KP3HP nantinya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Dinas Lingkup Pertanian) baik propinsi maupun kabupaten/ kota yang difasilitasi dengan dana APBN, APBD dan Swasta. Sesuai dengan paradigma baru pemerintah pusat telah bergeser sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan dinamisator bagi tumbuhkembangnya kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (KP3HP) di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB TA. 2001. *Praktik Terbaik Mengembangkan Klaster industri dan Jaringan Bisnis*. Policy Paper No. 8. ADB SME Development TA Indonesia. Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM.
- Anonym, 2011. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Apriyantono, A. 2005. Sambutan Menti Pertanian Republik Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
- Azis, A. 1992. Siapa dan Bagaimana Menggarap Agroindustri. Makalah pada seminar Nasional Agroindustri III. Desember 1992. Yogyakarta.
- Baharsyah, S. 1993. Pendayagunaan Sumberdaya Manusia, IPTEK dan Faktor Penunjang lainnya dalam Pengembangan Agroindustri. Makalah pada Lokakarya dan seminar Pengembangan Agroindustri. Jakarta.
- Djoko Said Damardjati, 2008, Roadmap Menuju Komoditas Pangan Bernilai Tambah, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Porter, Michael E. 2000. *The Microeconomic Foundations of Competitiveness and the Role of Klusters*. Mississippi. May, 2000.
- Porter, Michael E. 1997. *Building Competitive Advantage: Lessons from Other Countries*. Mediterranean Development Forum I: Towards Competitive and Caring Societies in the Middle East and North Africa. May 12 – 17, 1997. Dari <http://www.worldbank.org/mdf/mdf1/advantage.htm>
- Saragih, Bungaran (2000): Kebijakan pertanian untuk merealisasikan agribisnis sebagai penggerak utama perekonomian negara. Paper pada Panel Diskusi Jakarta American Club. Jakarta, November 14, 2000. Centre policy for agro studies
- Simatupang, P. 1999. Kebijaksanaan Produksi dan Penyediaan Pangan dalam Siregar, Masjidi *et. al.* (2001): Analisis Kebijaksanaan Perdagangan Komoditas Pangan. *Bulletin Agro Ekonomi* 1 (3) 2001: 12-17Rangka Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan pada Masa Pemulihan Perekonomian Nasional. Bahan diskusi .Round Table. Kebijakan Pangan dan Gizi di Masa Mendatang. Kantor Menpangan dan Holtikultura, 23 Juni 1999, Jakarta.
- Simatupang, P. 1995. *Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi*. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Taufik, Tatang A. 2003. *Pendekatan Klaster industri Dalam Pengembangan Unggulan Daerah: Telaah Konsep dan Gagasan Implementasi*. P2KTPUDPKM, DB PKT - BPPT.
- Taufik, Tatang A. 2002. *Pengembangan Klaster industri Daerah: Rancangan Percontohan*. Makalah dalam Widodo dkk. (Penyunting): "Peningkatan Daya Saing UKM Melalui Pendekatan Klaster industri." Prosiding Seminar Nasional. P2KTPUDPKM, DB PKT - BPPT.
- Taufik, Tatang A. 2001. *Perspektif Kebijakan: Pendekatan Klaster industri dalam Pengembangan Unggulan Daerah*. Makalah dalam Taufik dan Subagio (Penyunting): "Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa." P2KTPUDPKM, DB PKT - BPPT.

Daftar Lampiran



LAMPIRAN 1

CONTOH

**MATRIKS CHECK LIST DAN KUESIONER KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN UNIT USAHA KAWASAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DITJEN PPHP TAHUN 2013**

- I. Lokasi/Kabupaten :
- II. Propinsi :
- III. Komoditas :
- IV. Informasi awal :

Koordinasi Lintas Sektoral/Subsektoral/Instansi Lain:

No.		Ya	Tidak/belum	Keterangan
1.	Apakah kawasan ini telah menjadi kawasan pengembangan kementerian lainnya?			
2.	Apakah kawasan ini telah menjadi kawasan pengembangan eselon 1 lainnya di Kementan?			
3.	Apakah kawasan ini telah menjadi kawasan pengembangan provinsi?			
4.	Apakah kawasan ini telah menjadi kawasan pengembangan kabupaten?			
5.				

- V. Informasi Komoditas :

- Varietas yang banyak ditanam di kawasan :
 - (nama varietas)
 - (nama varietas)
 - (nama varietas)
 - (nama varietas)
- Total produktivitas komoditas kawasan ton/tahun
- Jumlah panen rata-rata per hektar :
 - Setiap panen : kg/ha
 - Per tahun : kg/ha/tahun
- Jumlah Gapoktan yang mengusahakan komoditas
- Jumlah Poktan yang mengusahakan komoditas kelompok
- Jumlah kepala keluarga (KK) yang mengusahakan komoditas KK
- Jumlah petani yang mengusahakan komoditas orang
- Luas areal penanaman komoditas : ha
- Standar mutu yang telah diterapkan oleh pelaku:

Jenis Standar	Sertifikasi untuk komoditas	Keterangan
GAP	☐ Prima 1 ☐ Prima 2 ☐ Prima 3 ☐ Lainnya	
GHP		



GMP		
Lainnya		

VI. Informasi Kawasan

1. Lokasi kawasan komoditas utama:

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- Koordinat kawasan :oLU:oLS:oBT

2. Informasi biofisik kawasan

- Jenis tanah kawasan :

Jenis Informasi		Keterangan
Ketinggian rata-rata dpl		
Suhu rata-rata		
Curah hujan rata-rata/tahun		

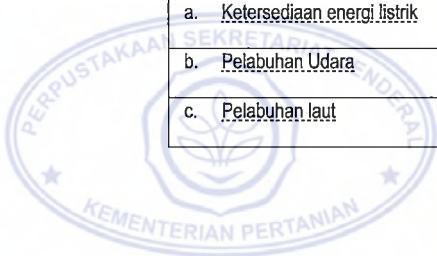
3. Total luas kawasan :

4. Kawasan pengembangan lainnya berada di sekitar kawasan : (diinisiasi oleh Instansi lain)

	Ada	Tidak ada	Keterangan
Kawasan pengembangan ekonomi			
Kawasan pengembang komoditi			
Kawasan Wisata/Agrowisata			
Kawasan Industri			
Kawasan berikat			
Kawasan pengembangan lainnya			

VII. Informasi Infrastruktur Kawasan

Informasi Infrastruktur di sekitar kawasan	ada	Tidak ada	Jarak dari kawasan (km)	keterangan
a. Ketersediaan energi listrik				
b. Pelabuhan Udara				
c. Pelabuhan laut				



d. Terminal peti kemas				
e. Pasar				
f. Sub terminal agribisnis				
g. Jalan raya				
h. Irigasi teknis				

VIII. Informasi SDM Kawasan

Informasi Kependudukan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Penduduk			
Jumlah usia Produktif			
Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian			
Jumlah tenaga kerja terdidik			

IX. Informasi pendukung/hulu (*downstream*) komoditas

a. Pemasok alat, mesin pertanian dan pengolahan

No.	Nama Pemasok Alat dan Mesin	Alamat/Lokasi	Jenis Mesin dan Alat	Keterangan (sertifikat)

b. Pemasok sapro lainnya

No.	Nama Pemasok Sarana Produksi	Alamat/Lokasi	Jenis Sarana	Keterangan (sertifikat)



X. Informasi hilir/processing (upstream) kawasan komoditas

a. Industri pengolahan

No.	Nama Industri Pengolahan	Alamat/Lokasi	Jenis Produk	Keterangan (sertifikat)

b. Rumah Kemas teregister

No.	Nama Kelompok Tani/Gapoktan	Alamat/Lokasi Rumah Kemas	Jenis Produk	Keterangan (sertifikat)

c. Pedagang pengumpul

No.	Nama Usaha/Pedagang	Alamat/Lokasi	Jenis Produk	Keterangan (sertifikat)

d. Eksportir

No.	Nama Eksportir	Alamat/Lokasi	Jenis Komoditi	Keterangan (sertifikat)

e. Lembaga sertifikasi penjamin mutu

No.	Nama Lembaga	Alamat/Lokasi	Lembaga Swasta (S)/Pemerintah (P)	Keterangan (sertifikat BSN)



XI. Informasi lembaga keuangan pendukung kawasan pengembangan

a. Lembaga perbankan

No.	Nama Bank/ BPR	Alamat/Lokasi	Lembaga Swasta (S)/ Pemerintah (P)	Jenis Kredit Program	Keterangan

b. Lembaga keuangan non bank

No.	Nama Lembaga Keuangan Non Bank (BMT, Kopdit, dll)	Alamat/Lokasi	Lembaga Swasta (S)/ Pemerintah (P)	Jenis Kredit	Keterangan

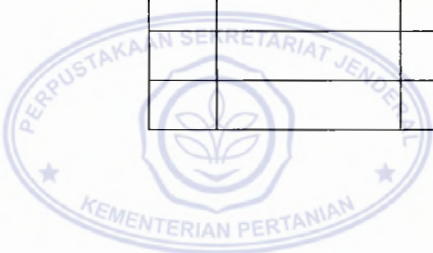
c. Lembaga penyedia resi gudang

No.	Nama Lembaga	Alamat/Lokasi	Lembaga Swasta (S)/ Pemerintah (P)	Keterangan

XII. Informasi lembaga pendampingan pendukung kawasan pengembangan

a. Ketersediaan Perguruan tinggi Pendamping

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat/Lokasi	Swasta (S)/ Negeri (N)	Memiliki jurusan Teknik Industri/ Teknologi Pertanian/ Pertanian (Ya/Tidak)	Keterangan



b. Ketersediaan Penyuluh

<u>No.</u>	<u>Jenis Penyuluhan</u>	<u>Jumlah Anggota Penyuluh</u>	<u>Keterangan</u>
1.			

XIII. Informasi dukungan lainnya :

a. Estimasi kebutuhan dukungan dari instansi lintas sektoral dan koordinasi horizontal dan vertikal

<u>No.</u>	<u>Nama Instansi</u>	<u>Bentuk Dukungan</u>	<u>Keterkaitan dengan Kawasan Pengembangan</u>	<u>Keterangan</u>



LAMPIRAN 2

CONTOH KUESIONER IDENTIFIKASI USAHA PENGHELA PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

(Diisi oleh Pelaku Usaha)

Harap diisi dengan huruf cetak atau diberi tanda silang pada pilihan yang sesuai

I. JENIS KOMODITI :

II. IDENTITAS PELAKU USAHA

1. Nama Kelompok :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
No Telepon :
No Fax :
Pemimpin kelompok :
2. Bulan & Tahun mulai beroperasi :
3. Jumlah Aset (diluar tanah, bangunan dan peralatan bantuan pemerintah/hibah):
.....

III. ASPEK KEBUTUHAN

A. KELEMBAGAAN

1. Apakah usaha yang dijalankan sekarang merupakan :
a. Usaha baru b. Melanjutkan usaha sebelumnya c. Pengembangan usaha yang ada
2. Apakah pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan ?
a. Tidak b. Ya
3. Penyerapan Tenaga Kerja

Uraian	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		
	2009	2010	2011
a. Tenaga Kerja Tetap			
b. Tenaga Kerja Tidak Tetap			

4. Apakah kelompok pelaku usaha telah memberikan retribusi kepada daerah?

5. Jenis Kebutuhan Pengembangan Kelembagaan Yang Dibutuhkan

No	Uraian	Keterangan

B. PENGOLAHAN PANGAN YANG BAIK (GMP)

1. Bahan Baku yang digunakan

Sebutkan bahan baku yang digunakan :

....., (lokal/impor), persentasenya.....

2. Upaya apakah yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan produk dari bahan baku lokal

No	Bahan Baku lokal yang digunakan	Produk yang dihasilkan	Keterangan
1.			
2.			
3.			

3. Upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah, sebutkan.....

No	Uraian	Keterangan

4. Apakah teknologi yang digunakan saat ini merupakan :

a. karya sendiri b. Karya orang lain yang dimodifikasi c. Karya orang lain seluruhnya

5. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan Pengembangan Pengolahan yang baik yang belum dimiliki usaha

No	Uraian	Keterangan



6. Dalam satu tahun terakhir produksi dilakukan :

1. Setiap hari
2. 1-2 minggu sekali
3. Sebulan sekali
4. Berdasarkan pesanan
5. Tidak menentu

7. Apakah sudah mempunyai SOP untuk setiap tahap pengolahan ?

a. Ya

b. Tidak

8. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan Penjaminan Mutu Produksi yang belum dimiliki?

C. KEMITRAAN DAN PERMODALAN

1. Pada saat awal usaha dimulai, darimana sumber permodalan utama diperoleh?

a. Modal sendiri

b. Modal sendiri dan luar

c. Modal luar

2. Sebutkan nama lembaga permodalan/keuangan, jika modal berasal dari luar

.....
.....

3. Apakah pernah melakukan kemitraan dalam pengadaan bahan baku?

No.	Nama Mitra/Kelompok Mitra	Bulan & Tahun Mulai Kemitraan
1.		
2.		
3.		

3. Apakah pernah melakukan kemitraan untuk pemasaran?

No.	Nama Mitra/Kelompok Mitra	Bulan & Tahun Mulai Kemitraan
1.		
2.		
3.		



4. Pembinaan yang pernah dilakukan kepada petani/kelompok tani pemasok adalah :

Nama Petani/Kel Tani	Bentuk Pembinaan	Tahun
1.		
2.		
3.		

5. Pengalaman menjadi mitra binaan dari instansi atau program BUMN atau perusahaan swasta.

Nama Instansi/ BUMN/Swasta	Bentuk Pembinaan/ Bantuan	Jumlah (Rp)	Tahun
1.			
2.			
3.			

Terangkan hak dan kewajiban diantara Anda dengan mitra :

6. Pengalaman Kemitraan Membina mitra
 7. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan yang berhubungan dengan permodalan dan kemitraan

D. PEMASARAN

1. Nilai, Volume Penjualan Selama 3 tahun terakhir

URAIAN	2011		2010		2009	
	Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)
1. Penjualan Dalam Propinsi						
1. Produk						
2. Produk						
3. Produk						
4. Produk						
5. Produk						
Penjualan Luar Propinsi						
1. Produk						
2. Produk						
3. Produk						
4. Produk						
5. Produk						
Total Nilai Penjualan						



2. Upaya peningkatan penjualan

1. Mengikuti pameran : a. Ya b. Tidak
2. Katalog, brosur, leaflet : a. Ya b. Tidak
3. Website : a. Ya b. Tidak
4. Iklan di media massa : a. Ya b. Tidak
5. Upaya lain, sebutkan!

3. Sebutkan kebutuhan terobosan dalam pemasaran yang dibutuhkan oleh usaha ?



LAMPIRAN 3

CONTOH KUESIONER PEMILIHAN KAWASAN KP3HP

Faktor-faktor kritis pemilihan suatu klaster dan kawasan KP3HP terpilih terdiri atas 6 kelompok, yaitu:

- Memiliki kontribusi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi nasional/daerah
- Mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
- Memiliki daya dukung Sumber Daya Alam
- Memiliki daya dukung SDM
- Memiliki daya dukung Lembaga Finansial
- Memiliki daya dukung Informasi
- Memiliki daya dukung teknologi
- Memiliki komoditas unggulan dari 40 (puluh) komoditas unggulan nasional sesuai renstra Kementan

Mohon Ibu/Bapak/Sdr memberikan nilai bagi setiap kompetensi berikut (skala penilaian 0 - 9)

Petunjuk penilaian

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN (SKD)

0 – 3 SKD RENDAH	>3 - 6 SKD SEDANG	>6 - 9 SKD TINGGI
- Faktor kritis tidak diperlukan dalam pengembangan kawasan - Faktor kritis tidak diperlukan atau atau sangat sedikit diperlukan di dalam kawasan - Faktor-faktor kritis kawasan sedikit diperlukan atau - Faktor kritis diperlukan namun tidak terlalu penting bagi pengembangan kawasan	- Faktor-faktor kritis kadang-kadang digunakan - Faktor kritis meningkatkan kinerja kawasan tetapi tidak mutlak atau diharuskan - Faktor-faktor kritis kadang-kadang tampak nyata - Faktor kritis mempunyai arti tertentu bagi organisasi/unit kerja	- Faktor kritis sering digunakan - Faktor kritis menjadi bagian rutin/reguler/ menyeluruh atau integral/penting dari klaster dan kawasan - Faktor kritis jelas sekali tampak sebagai bagian dari pekerjaan - Faktor kritis sangat penting bagi kawasan /unit usaha

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI SAAT INI (SKS)

0 – 3 SKS RENDAH	>3 – 6 SKS SEDANG	>6 – 9 SKS TINGGI
- Faktor tidak tersedia dalam menerapkan kawasan (0%) - Penggunaan faktor kritis masih belum tersedia atau sedikit ada dalam area kawasan (dibawah 20%) - Faktor kritis tidak mencukupi atau tidak memuaskan (20-30%)	- Faktor-faktor kritis cukup tersedia dalam kawasan (30 - 40%) - Faktor-faktor tersedia namun perlu penambahan secara berangsur agar kawasan bisa berjalan (40 - 50%) - Faktor-faktor telah tersedia cukup namun belum memuaskan (50-60%)	- Faktor tersedia cukup dan bisa memenuhi kebutuhan kawasan - Faktor tersedia cukup dan memuaskan pemenuhan kebutuhan kawasan - Faktor tersedia melimpah dan memuaskan untuk pemenuhan kebutuhan kawasan



CRI-CRI		SKALA KOMPETENSI	
		SKD	SKS
a. KOMPETENSI : Memiliki kontribusi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi daerah			
	Potensi retribusi		
	Potensi peningkatan pajak		
	Potensi multiplier effect		
	Peningkatan kesempatan kerja		
	Peningkatan kesempatan berusaha		
b. KOMPETENSI : Mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah			
	Dukungan kebijakan		
	Dukungan anggaran		
	Dukungan sosial budaya masyarakat		
	Infrastruktur jalan		
	Infrastruktur listrik/energi		
c. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung Sumber Daya Alam			
	Bahan baku		
	Infrastruktur dan daya dukung lahan serta air		
	Efek dampak lingkungan		



CIRI - CIRI		SKALA KOMPETENSI	
		SKD	SKS
d. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung SDM			
	Tersedia lembaga pendidikan tinggi		
	Tersedia tenaga kerja terlatih		
	Tersedia lembaga keterampilan		
e. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung Lembaga Finansial			
	Terdapat lembaga keuangan		
	Terdapat program CSR atau kemitraan dari usaha besar		
	Terdapat lembaga keuangan penjamin dan asuransi pertanian		
	Terdapat lembaga resi gudang		
f. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung Informasi			
	Tersedia jaringan telepon/fax		
	Tersedia jaringan internet		
	Tersedia lembaga cargo dan ekspedisi		



CIRI – CIRI		SKALA KOMPETENSI	
		SKD	SKS
g. KOMPETENSI : Memiliki daya dukung teknologi			
	Tersedia teknologi proses yang mudah dan ramah lingkungan		
	Tersedia penyedia dan perakit mesin dan alat produksi		
	Tersedia lembaga penyuluhan dan pendamping teknologi		
h. KOMPETENSI : Memiliki komoditas unggulan dari 40 (puluh) komoditas unggulan nasional sesuai renstra Kementan			
	Terdapat kawasan pengembangan komoditi		
	Tersedia potensi lahan yang sesuai dengan komoditi yang dikembangkan		
i. KOMPETENSI :			





Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
KEMENTERIAN PERTANIAN

Alamat:

Jl. Harsono RM No 3 , Gedung D Lt .2, Ragunan
Jakarta 12550, Indonesia Tel/Fax : (021)-78837929
<http://pphp.deptan.go.id>